

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat Tanggunggunung memang punya pesona dalam menampilkan keagamaannya. Bagaimana tidak, seluruh kejadian terutama yang berkaitan dengan cara masyarakat mempraktikkan ibadahnya tembus dalam kebiasaan sehari-hari mereka. Sebagai orang Jawa, hal ini tentu lumrah terjadi karena sejatinya spiritualitas sudah sejak lama mereka hayati dan biasanya dimanifestasikan dalam lelucon hidupnya. Spiritualitas ini telah ada sebelum agama-agama dunia mengenalkan dirinya di Jawa, di dahului Hindhu-Budha hingga akhirnya Islam yang menjadi agama mayoritas sampai sekarang ini. Fenomena tersebut tentu tidak langsung terjadi begitu saja. Ada proses panjang yang harus dihadapi, salah satunya benturan Islamisasi yang terjadi di Tanggunggunung pada periode itu. Hasilnya, Islamisasi telah mengenalkan tempat baru bernama masjid, musholla atau *langgar*.

Ketiga nama itu merupakan tempat ibadah orang Islam dalam menjalankan ritual keagamaan yang menjadi pemandangan menarik di Tanggunggunung. Identitas ini yang secara nyata mampu dilihat indra manusia dalam menopang sejauh mana ritual umat Islam dijalankan. Istilah sederhananya, orang dengan mudah melihat langsung bentuk ritual yang menjadi kewajiban yang harus mereka lakukan di tempat ibadah ini. Ritual itu bernama sholat. Tanpa adanya rumah ibadah, ada semacam kekosongan dalam memaknai agama. Masjid menjadi rumah ruhani bagi setiap orang

Islam.<sup>1</sup> Tetapi, kebanyakan orang akrab menjulukinya rumah Tuhan. Umat Islam punya alasan menyebutnya demikian karena hubungan manusia dengan Tuhannya terjalin erat di bangunan ini.

Tidak hanya umat Islam saja yang memiliki tempat ibadah sebagai sarana mendekatkan diri dengan Tuhannya. Agama lain juga punya tempat Ibadah yang menjadi kebanggaan setiap agama, seperti Kristen dengan Gerejaanya, Budha dengan Viharanya, Hindhu dengan Purenya, Khonghucu dengan Klentengnya. Tempat ibadah biasanya menyesuaikan diri dengan karakteristik ajaran yang dibawahnya, berselancar dengan wilayah geografis dimana agama tersebut menetap. Tidak heran apabila dalam satu agama kadang ditemukan hal yang berbeda-beda, mulai dari bentuk bangunan, praktik keagamaan yang dijalankan, bahkan nama-nama tempat ibadah. Sampai-sampai perpaduan ajaran dan budaya bertatap muka, bertemu dalam bangunan fisiknya sebagai mahakarya dalam mengekspresikan kebanggaannya terhadap bangunan ibadah. Masih banyak bangunan-bangunan ibadah, seperti masjid, masih mempertahankan sifat keasliannya. Sebenarnya, dengan adanya beragam model tempat ibadah yang disuguhkan, akar kebudayaan manusia juga bisa dipelajari karena bentuk bangunan juga memperlihatkan konstruksi cara berpikir dan kesadaran manusia.

Nama masjid diambil sesuai dengan fungsi utamanya sebagai tempat sujud. Menurut Annemararie Schimmel, asal kata masjid dilihat dari kata *sajada*, ‘bersujud’ dengan maksud bahwa masjid dibuat sebagai ‘tempat

---

<sup>1</sup>Rumah ruhani adalah tempat di mana seorang muslim tidak hanya jasadnya saja yang berada di dalam masjid tetapi lebih pada kehadiran hatinya. Lihat Zuhairi Misrawi, *Madinah Kota Suci, Piagam Madinah Dan Teladan Muhammad SAW*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 333

bersujud' kepada Tuhan.<sup>2</sup> Praktik sujud terdapat dalam salah satu gerakan ritual solat, kewajiban yang selalu dijalankan setiap lima waktu dalam sehari. Ritual ini diperintah langsung oleh Tuhan kepada nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Setidaknya, kata masjid banyak ditemukan di dalam Al Qur'an, kitab suci pegangan umat Islam yang dijadikan pedoman hidupnya. Jika dilacak dari sisi teks suci yakni al Qur'an, kata 'masjid' disebut sebanyak 28 kali, 22 kali diantaranya dalam bentuk tunggal dan 6 kali dalam bentuk jamak.<sup>3</sup> Setiap umat Islam di berbagai penjuru dunia pasti kenal dengan tempat ibadah ini, tidak terkecuali Indonesia.

Sudah semestinya masyarakat Indonesia mengenalnya, karena mayoritas agamanya Islam. Di sini, Islam tumbuh subur, menjunjung kehidupan damai di tengah keberagaman suku, ras, adat dan tradisi. agama Islam harus memposisikan diri di dalam berbagai kebudayaan yang selama ini tetap dipegang teguh masyarakat. Situasi yang demikian ini tidak hadir dengan mudahnya. Perkembangan Islam di Indonesia tidak langsung berjalan mulus, butuh waktu dan ketegangan untuk sampai pada kondisi yang kita jalani sekarang ini. Bangkitnya semangat keagamaan yang menggebu-gebu belakangan ini tidak muncul begitu saja, tapi merupakan rangkaian dari perjalanan panjang Islamisasi di Indonesia.<sup>4</sup> Masuknya Islam di bumi Nusantara tidak bisa terlepas dari keagamaan sebelumnya yang telah

---

<sup>2</sup>Arif Hidayat, "Masjid Dalam Menyikapi Peradaban Baru," *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol.12, No.1, Januari-Juni 2004, hlm. 14

<sup>3</sup> Penyebutan masjid di dalam Al Qur'an sangat berbeda-beda, setidaknya ada 15 kali yang membicarakan tentang Masjid Al-Haram, selebihnya membicarakan tentang kesejarahan maupun motivasi pembangunan, posisi dan fungsi dimilikinya serta etika memasuki dan menggunakannya. Lihat Makhmud Syafe'i, *Masjid dalam Perspektif sejarah dan hukum Islam*, [http://dir=Direktori/FPIPS/M\\_K\\_D\\_U/195504281988031-MAKHMUD\\_SYAFE%27I/](http://dir=Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195504281988031-MAKHMUD_SYAFE%27I/) diakses tanggal 07 Pebruari 2018.

<sup>4</sup> Lutfi Assyaukarnie, *Kata Pengantar dalam Bernard H.M. Vlekke, Nusantara Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan populer Gramedia, 2016), hlm. xii.

mengakar kuat di Jawa, sebagai wilayah yang dengan mudahnya menerima agama.

Periode panjang masuknya Islam terhitung mulai ditemukan makam kaum bangsawan yang mengikuti penanggalan Islam pada batu nisannya, ditemukan di dekat pusat kerajaan Majapahit di Abad 14. Dalam sejarah Islam, jarang kita temui pergolakan keagamaan yang dimulai dari bawah ke atas. Pergolakan selalu terjadi dari kalangan elite penguasa. Sama seperti pada akhir Abad 15 sebagai titik Islamisasi besar-besaran di Jawa, karena Prabu Brawijaya V yang diakui sebagai raja terakhir Majapahit telah memeluk Islam. Prinsip *agama ageming aji* yang diterapkan di Jawa, membuat rakyat mengikuti apa keyakinan dan agama rajanya.<sup>5</sup> Perlu diingat, agama yang singgah ke wilayah Jawa pasti disaring pemerintahan, yang waktu itu representasi dari pemerintah adalah kerajaan. Selama agama yang masuk tidak membahayakan stabilitas kerajaan dan bersifat lentur dengan budaya masyarakat, tentu dapat diterima pihak kerajaan dan diikuti rakyatnya. Artinya, agama masuk tanpa menghilangkan sifat dasar kebudayaan asli yang diyakini, dirawat dan dijalankan masyarakat Jawa pada umumnya. Kebutuhan agama, bagi masyarakat bisa dilihat dari tatahan pemerintahannya, terdapat pola kawasan yang saling berkaitan. Pola segi tipe istana, alun-alun dan fasilitas ibadah (masjid) merupakan perwujudan antara kesatuan raja, rakyat dan agama.<sup>6</sup>

Dilihat dari konteks sejarahnya, keberadaan masjid di Indonesia berhubungan erat dengan tradisi Hindhu-Buddha. Sebelum Islam datang,

---

<sup>5</sup> M. Hariwijaya, *Islam Kejawaen*, (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006), hlm. 1

<sup>6</sup> Yulianto Sumalyo, *Arsitektur Masjid dan Monumen Sejarah Muslim*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2006), hlm. 495

menurut Sidi Gazalba, bangunan *langgar/surau* sudah dikenal luas dalam masyarakat Hindhu-Budha di Indonesia.<sup>7</sup> Tempat ibadah mendapat penghormatan dan derajat yang tinggi dimasyarakat. Penghormatan itu terlihat dari bagaimana bangunan ini ditempatkan. Tanpa disadari, konsepsi dasar atas tempat ibadah dari dulu hingga sekarang belum bergeser sepenuhnya. Itu artinya, masyarakat di samping menghormati tempat ibadah juga sangat memperhatikan apa yang telah leluhur ciptakan.

Model ini masih diwarisi oleh masyarakat Jawa hingga kini dan tempat ibadah masih menjadi bangunan yang ramah untuk tempat berkumpul dan belajar keagamaan. Bahkan, ornamen-ornamen yang menghiasi tempat ibadah orang Islam ini tetap memiliki hubungan dengan agama terdahulu yang diyakini masyarakat Jawa. Prinsip masyarakat Jawa yang selalu menautkan diri dengan leluhurnya ini yang menjadi penyebabnya. Hal tersebut dapat kita lihat misalnya dalam bangunan masjid di Jawa yang di dekatnya terkadang ada makamnya.

Di berbagai wilayah di Indonesia masjid memiliki beragam penamaan, mulai dari *surau* di Minangkau, *meunasah* di Aceh, *tajug* di Jawa Barat, mesjid, *langgar* atau musholla di Jawa, khususnya bagian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Warisan ini yang terus diingat masyarakat Jawa sebagai suatu ikhtiar yang tidak hilang akarnya dengan leluhur dulu. Walaupun, Islamisasi terus menempati kekuatan utama yang menancapkan diri di dalam kehidupan masyarakat Jawa.

---

<sup>7</sup> Bentuk dan kegunaannya sebenarnya yang diambil dari tradisi Hindhu-Budha. Dulu, peletakan rumah ibadah selalu ditaruh diatas bukit atau lebih tinggi dari bangunan sekitarnya. Disamping itu, tempat ini juga dipakai untuk berkumpul, belajar keagamaan. Lihat Mohammad Kosim, "Langgar sebagai Institusi Pendidikan Keagamaan Islam," *Tadris*, Volume 4, Nomor 2. 2009, hlm. 238

Puncak ketegangan yang paling berat sebagai kelanjutan dari Islamisasi terjadi di abad 20 yang digambarkan Ricklef dalam bukunya *Mengislamkan Jawa*, di mana ia memotret ada dua polarisasi yang semakin terbuka lebar, dilihat dalam konstestasi politik nasional kala itu adalah putihan dan abangan. Periode pelebaran itu terjadi pasca kemerdekaan Indonesia dan pemilu pertama di tahun 1955. Kaum Muslim Jawa yang saleh dan berpegang teguh pada ajaran Islam menyebut diri mereka sendiri putihan (golongan putih), tetapi juga ada banyak dari mereka yang tidak siap untuk menerima versi Islam yang baru dan lebih menuntut dari mereka ini; mereka dijuluki sebagai kaum abangan (golongan merah ‘coklat’).<sup>8</sup>

Ketegangan antara dua kutub ini tidak hanya terjadi di wilayah pusat saja, tetapi merambah ke lapisan masyarakat di pedalaman Jawa. Tanggunggunung termasuk salah satu kecamatan di Tulungagung yang tergolong pedalaman Jawa dan tidak luput terkena imbasnya akibat situasi saat itu. Maksud Pedalaman Jawa di sini lebih merujuk pada penelitian yang dilakukan Geertz di wilayah bernama Mojokuto<sup>9</sup> yang akhir-akhir ini dikenal dengan nama Pare di Kediri.

Letak Tanggunggunung tidak jauh dengan Pare, karena secara geografis Kediri dan Tulungagung berbatasan langsung, tepatnya berada di

---

<sup>8</sup> Ini dimaknai sebagai politik aliran, saat itu abangan direpresentasikan oleh partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI), sedangkan putihan direpresentasikan oleh Parta Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU). Lihat MC. Ricklef, *Mengislamkan Jawa; Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*, (Jakarta:PT Serambi Ilmu Semesta, 2012), hlm. 49

<sup>9</sup> Kota kecil ini berada di tengah Jawa Timur, terletak dibagian ujung paling timur dari sebuah persawahan yang besar dan beririgasi. Wilayah ini dikelilingi sungai yang melingkar, melintas daratan itu, mengalir ke utara menuju laut Jawa. Di wilayah Jawa Timur sungai yang terbesar dan panjang melingkar disebut-sebut sebagai nama sungai Brantas. Lihat Clifford Geertz, *Agama Jawa; Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2014), hlm. xxv.

selatannya Kediri. Pembagian istilah santri dan abangan yang dikenalkan Geertz pada masanya tidak populer dipakai di wilayah ini, sebab mereka lebih familiar menggunakan nama partai politik yang ada, ketimbang pembagian sosial keagamaan tersebut. Ada empat partai politik yang sedang berlomba menarik pendukung seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Nahdlatul Ulama (NU). Keseluruhan partai politik ada di Tanggunggunung, tetapi yang paling menonjolkan taringnya mencari dukungan massa saat itu adalah NU dan PKI.

Keduanya mencari pengaruh di masyarakat dengan berbagai cara untuk meyakinkan masyarakat. Tidak jarang gesekan sering terjadi antar kedua tokoh partai politik ini. Kejadian berdarah di tahun 60-an merubah arah haluan masyarakat mulai dari sosial, keagamaan dan politik. PKI harus bertanggungjawab atas kejadian yang dianggap melancarkan kudeta terhadap pemerintahan. PKI harus dibatasi geraknya dan dianggap momok yang harus dibumi-hanguskan dari jagad perpolitikan. Semua yang terjaring dengan PKI hanya ada dua kemungkinan, dijadikan tahanan politik atau dihabisi. Didasarkan pada intensitasnya, pembantaian pertama dilakukan pada periode oktober 1965 sampai januari 1966, sedangkan pembantaian yang kedua dilaksanakan pada periode antara januari 1966 sampai agustus 1966. Jika dibandingkan, pembantaian periode pertama adalah pembantaian skala besar-besaran yang jumlah korbannya paling banyak.

Pembantaian tersebut menyasar wilayah struktural. Artinya, siapa saja yang terbukti secara struktur mengikuti PKI akan dibinasakan. Tidak hanya

itu, pembunuhan juga terjadi pada orang-orang yang dibencinya. Orang-orang dengan mudahnya menunjuk orang lain bagian dari PKI. Artinya, pembunuhan saat itu, bisa juga salah sasaran. Situasinya lumpuh, orang merasa tunduk dan tertekan. Orang tidak bisa melarikan diri ke tempat lain, karena keselamatannya kecil. Para algojo, berkeliling terus menerus pada periode itu. Sebagian besar algojo adalah para pemuda Muslim yang lebih taat menjalankan agamanya dibandingkan sebagian besar masyarakat, dan para korban terutama adalah Muslim yang kurang taat atau Muslim nominal (jika bukan anti Islam).<sup>10</sup>

Ketakutan, trauma dan bentuk lainnya campur-aduk dirasakan masyarakat Tanggunggunung saat itu. Jalan satu-satunya, orang harus meningkatkan ketakwaan beribadah secara massal agar ia tidak dituduh memiliki hubungan dengan PKI. Segala bentuk kebiasaan, praktik keagamaan dan keyakinan-keyakinan tentang Islam menjadi asupan setiap hari masyarakat. Masyarakat semakin giat menjalankan kewajiban-kewajiban Islam yang sebelumnya tidak terlalu nampak di wilayah Tanggunggunung. Praktik keagamaan yang sangat terlihat adalah ibadah sholat di masjid dan *Langgar*. Kekalahan ini menjadikan NU di Tanggunggunung tumbuh subur tanpa ada tandingan.

Jika dilihat dari organisasi NU, masyarakat Tanggunggunung keseluruhan memeluk organisasi keagamaan tersebut. Organisasi keagamaan ini sekarang tidak lagi spesifik terjun ke dalam partai politik seperti yang

---

<sup>10</sup> Jika dilihat dari peristiwa ini, seakan-akan hal tersebut sesuai dengan konsep perang suci (jihad) dalam Islam. Pembantaian tersebut dimaknai sebagai kehendak Tuhan. Lihat Hermawan Sulisty, *Palu Arit di Ladang Tebu*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000), hlm. 238



dilakukannya kala itu. Keputusan ini diambil NU di Munas Situbondo dan Muhtamar Situbondo 1984, menandai bahwa organisasi ini tidak terlibat lagi politik praktis dan menegaskan Pancasila sebagai asas tunggal. Ada tugas-tugas yang terabaikan selama NU terjun sebagai partai politik yaitu pendidikan dan bentuk sosial lainnya yang telah diperjuangkan pendiri NU saat pertama kali organisasi ini berdiri. Pandangan ini kemudian disebut sebagai *Khittah*, atau pola dasar dalam berpikir dan bertindak kembali ke awal 1926.<sup>11</sup>

Banyak dan tumbuh suburnya lembaga ke-Islam-an di Indonesia turut mengokohkan Islamisasi. Akibatnya jumlah masjid dan *langgar* meningkat setiap tahunnya. Hal ini turut menjadikan Indonesia menjadi negara predikat penyumbang masjid dan *langgar* terbanyak di kancah dunia. Pertumbuhan dan perkembangan masjid dan musholla merujuk pada Data Bimas Islam dalam angka dari tahun ke tahun hingga tahun 2015 mencapai 741.991, sejalan dengan besarnya data tersebut semakin banyak permohonan bantuan pembangunan/rehab masjid dan musholla hingga mencapai 1000 hingga 1500 permohonan bantuan sehingga kebutuhan akan tersedianya masjid dan musholla yang layak dan memiliki sarana sanitasi menjadi kebutuhan mutlak diperlukan oleh umat Islam saat ini.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Terkait *khittah* ini pertama digunakan oleh kiai Ahmad Shiddiq untuk meringkas gagasan pokok dan menengahi perdebatan panjang mau di bawa ke mana NU saat itu. NU bertujuan sebagai organisasi keagamaan dan partisipasi politik praktis hanya imbuhan saja yang sebenarnya telah berakhir sejak 1973, ketika peranan politiknya diambil alih PPP. *Khittah* ini meliputi empat kelompok kegiatan: Pendidikan, Kesejahteraan sosial, penyebaran agama dan perekonomian. Lihat Martin Van Brunessen, *NU; Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994), hlm. 115

<sup>12</sup> Abdul Djamil, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 214 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla*.

Kebutuhan akan ketersediaan masjid dan *langgar* juga terjadi di wilayah Tanggunggunung. Banyak masjid dan *langgar* tersebar di seluruh desa yang ada di kecamatan Tanggunggunung. Semua rumah ibadah sudah berdiri megah dengan bangunan permanen, malah ada juga yang masih mengalami proses pembangunan dan belum selesai pembangunannya. Tidak ada bangunan tempat ibadah di Tanggunggunung yang ala kadarnya, seperti dulu yang temboknya terbuat dari anyaman bambu, atapnya dari daun ilalang atau pun daun aren dan ukurannya terlihat sangat sempit dan hanya muat beberapa orang saja. Masjid seakan-akan menjadi kebutuhan yang krusial bagi masyarakat Tanggunggunung. Kebutuhan masyarakat sebenarnya bukan hanya urusan ibadah, tetapi juga melingkupi seluruh sektor kehidupan manusia. Dengan begitu, masjid tidak hanya digunakan sebagai sarana ibadah saja, melainkan menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat. Persis seperti masjid pada zaman nabi yang digunakan bermacam-macam kegiatan. Masjid lebih dari sekadar tempat menunaikan ibadah salat, bahkan dalam dinamika sejarah kaum muslimin tempat ini merupakan salah satu pusat terpenting peradaban Islam.<sup>13</sup>

Bagi masyarakat Tanggunggunung yang merupakan bagian dari karakter orang Jawa, tidak lengkap jika unsur lain untuk meneguhkan ke-Jawa-annya tidak ikut terlibat. Peneguhan itu tertuju pada ritual yang menurut Geertz, menjadi intisari masyarakat Jawa yaitu slametan. Tak afdol, jika masyarakat Jawa tidak melaksanakan kegiatan ini dalam memperingati

---

<sup>13</sup> Dalam sejarahnya, di zaman nabi, masjid menjadi pusat pemerintahan, musyawarah dan segala bentuk kegiatan lainnya. Jadi, tidak hanya terkhusus untuk tempat ibadah saja. Lihat Azyumardi Azra, *Masjid Sebagai Refleksi Peradaban Islam. Kata Pengantar dalam A. Heukan Sj. Masjid Tua di Jakarta*, (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 2007), hlm.11

perjalanan manusia. Seluruh gerak kehidupan masyarakat Jawa tidak luput dari ritual yang satu ini, bahkan di masjid dan *langgar* kegiatan ini tidak mungkin tertinggal. Karena semenjak adanya tempat ibadah ini, masyarakat Tanggunggunung tak jarang menggunakannya sebagai tempat merayakan *slametan*.

Budaya Jawa yang sudah lama diwarisi ternyata ikut mewarnai aktivitas di dalam masyarakat Jawa yang konsentrasinya terpusat di tempat ibadah seluruh Tanggunggunung. Ada lagi bentuk warisan yang dijalankan masyarakat Tanggunggunung dan telah lama mengakar sebagai amaliyah NU yaitu *yasinan* dan *tahlilan*. Kegiatan ini sudah menjadi hal lumrah yang dapat dijumpai di dalam masyarakat Tanggunggunung, tetapi setelah banyak masjid dan *langgar*, tradisi ini semakin menjamur dan menemukan panggunya. Masyarakat menjadikan masjid dan *langgar* sebagai ruang publik baru yang ramah terhadap budaya sehingga orang tidak ada rasa takut pergi ke tempat ibadah ini.

Akhir-akhir ini di Tanggunggunung, masjid dan *langgar* sepi dari aktivitas sosial-keagamaan. Kewajiban seperti solat tetap berjalan, walaupun tidak keseluruhan tempat ibadah merata rutin mendirikan sholat lima waktu. Pada moment tertentu seperti hari besar umat Islam, Idul Adha dan Idul Fitri misalnya, jumlah jamaah sholat tiba-tiba membludak. Jamaah shalat di tempat ibadah bisa dilihat dari fleksibelnya masyarakat dalam menunaikan kewajiban ini.

Masyarakat disaat musim panen tiba, bisa dipastikan hanya beberapa gelintir orang yang ikut menunaikan sholat berjamaah di tempat ibadah.

Jamaah-jamaah yasinan dan tahlilan terbentuk banyak, ruangan berjubel-jubel jamaah, peminatnya pun konsisten melebihi jamaah di masjid dan *langgar*. Biasanya masyarakat rutin melaksanakan setiap malam jum'at, bahkan bagi kebanyakan masyarakat Tanggunggunung, mendatangi yasinan dan tahlilan lebih utama dari pada menjalankan sholat di masjid dan *langgar*. Padahal tumbuh suburnya jamaah yasin dan tahlil di Tanggunggunung tidak terlepas dari peran rumah ibadah ini. Melihat fenomena yang terjadi di tataran luar masyarakat Tanggunggunung, maka perlu lebih jauh mengerucutkannya ke dalam sebuah pertanyaan penelitian terkait fungsi masjid dan *langgar* bagi masyarakat Tanggunggunung.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Dari masalah yang tampil ke permukaan mengenai masjid dan *langgar* di Tanggunggunung, perlu kiranya ada pemecahan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik dan memperinci setiap bagian. Hal ini untuk membatasi penelitian agar pembahasan tidak meluas ke mana-mana. Penelitian ini terbagi dalam beberapa pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Mengapa masjid dan *langgar* di kecamatan Tanggunggunung pasca-65 secara signifikan mengalami kenaikan kuantitas bangunan dan jamaah?
2. Bagaimana situasi Masjid dan *Langgar* di kecamatan Tanggunggunung Sebelum tahun 65 dan pasca 65?
3. Apakah Masjid dan *Langgar* di Kecamatan Tanggunggunung saat ini masih berperan sebagai ruang publik?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih jauh Islamisasi yang ada di Tanggunggunung dengan melihat tempat ibadahnya dan sejarah perkembangannya. Keterkaitan ini ingin melihat keberadaan tempat ibadah yang saat ini menjamur dengan konteks situasi Indonesia masa lalu.
2. Mendapatkan data yang berkaitan dengan situasi tempat ibadah yang tentu selalu berbeda situasinya di setiap periode. Penelitian ini sengaja ingin memotret apa yang nampak dari bangunan ini. Bangunan ini tidak mungkin bisa dipotret tanpa melibatkan hubungan sosial-keagamaan di masyarakat. Dengan begitu, melihat situasi tempat ibadah sangat penting karena pusat keagamaan khususnya Islam ada di sini.
3. Mengungkap tentang status fungsi tempat ibadah umat Islam ini. Masih sesuai apa tidak dengan fungsi masjid pada umumnya. Utamanya penelitian ini terkait dengan ruang dimana lalu lalang orang tidak terbatas. Bukan hanya terkenal sebagai tempat ibadah saja, tetapi hubungan sosialnya biasanya juga ada di tempat ibadah.

### D. Manfaat Penelitian

Melihat gambaran penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini semoga memberikan bekal untuk semakin giat melakukan riset utamanya spesifikasi kajian masjid dan *langgar*. Hal ini bukan tanpa alasan, karena penelitian ini masih dilakukan pertama kali

oleh peneliti. Sehingga ini akan memacu gerak untuk lebih semangat lagi mempelajari lebih dalam kajian tersebut. Ternyata di dalam bangunan yang kecil ini, seluruh tata pikir masyarakat dapat dipelajari.

## 2. Akademik

Penelitian ini mencoba memberikan warna baru, walaupun sebenarnya sudah banyak yang meneliti tentang rumah ibadah ini. Warna tersebut terlihat dari sisi lokalitas yang terjadi di Tanggunggunung. Masjid dan *langgar* di Tanggunggunung menawarkan kompleksivitas di dalamnya. Tempat ini dalam sejarahnya tidak mudah ditemui di Tanggunggunung seperti yang sekarang kita ketahui ini. Maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khazanah keilmuan kajian yang berkaitan dengan tempat ibadah umat Islam. Belakangan ini masjid dan *langgar* fungsinya hanya dipahami sebagai rumah ibadah.

## E. Kerangka Teori

### 1. Konflik Fungsional

Tidak asing lagi kita disuguhkan sehari-hari dengan kata ‘konflik’, bahkan hal ini sudah menjadi kenyataan yang terjadi di masyarakat hingga hari ini. Di dalam tokoh-tokoh filsafat, pendefinisian kata ini melalui tahap perdebatan panjang antar tokohnya, mulai dari Mark sampai Randal Collin. Tetapi dasar teori besar memang tidak bisa dipisahkan dari sosok Mark, karena tokoh inilah yang melihat kompleksivitas ketimpangan masyarakat secara langsung. Sebelum Mark, perdebatan lebih massif antar tokoh dilakukan ke dalam hal-hal yang berbau metafisik. Menurutnya,

Konflik bisa terjadi karena masyarakat yang terdiri atas individu yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Namun, karena kondisi yang menempatkan kemauan individu yang berbeda-beda kebutuhan inilah penyebabnya. Para Individu membentuk suatu kelas sejauh mereka berada dalam konflik bersama dengan orang lain mengenai nilai surplus.<sup>14</sup>

Di zaman Revolusi Industri di mana Mark mengalami kejadian itu, pembagian kelas semakin terbuka lebar. Kelas ini terbagi dari dua kelas yaitu borjuis (kalangan pemilik modal) dan proletar (kalangan buruh). Menurut Mark, perbedaan keduanya terletak pada tujuannya. Kaum borjuis bertujuan mewakili kepentingan yang khusus, sedangkan proletar bertujuan mewakili umat manusia secara keseluruhan. Pembagian yang penting dalam masyarakat adalah pembagian antar kelas-kelas yang berbeda: faktor yang paling penting mempengaruhi gaya hidup dan kesadaran individu adalah posisi kelas; ketegangan konflik paling besar dalam masyarakat tersembunyi atau terbuka, adalah yang terjadi antar kelas yang berbeda, dan salah satu perubahan sosial yang paling ampuh adalah yang muncul dari kemenangan satu kelas lawan kelas lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mark berpandangan bahwa, suatu kelas baru itu muncul bila masyarakat sadar atas hubungan mereka yang berkonflik dengan kelas-kelas lainnya. Lihat George Ritzer, *Edisi Ke delapan Teori Sosiologi Klasik: Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.103

<sup>15</sup> Fakta di Eropa tampak meruncing akibat situasi konflik kelas-kelas. Kenyataan ini mengubah suatu masyarakat sesuai dengan kepentingan. Kepentingan yang terlihat adalah usaha untuk memperoleh kedudukan dan terus berputar, menimbulkan konflik yang tak berkesudahan. Mulanya borjuis dibantu proletar untuk menggulingkan sistem feodal kuno yang dimainkan aristokrat. Setelah borjuis menguasai pos-pos yang tersedia, giliran proletar yang merasa tertindas melakukan perlawanan. Akibatnya konflik ini, perubahan sosial sangat mungkin terjadi dan satu faktor kunci tergantung pada perkembangan kekuatan produksi materil yang sesuai. Lihat Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 146

Pemilikan atau kontrol atas dasar alat produksi merupakan dasar untuk melihat tipe-tipe di dalam masyarakat dalam menampilkan kelas sosial. Variasi dalam sumber-sumber dan alat produksi yang membuat jurang pembeda dalam struktur-struktur kelas. Kesejangan antar keduanya ini menuntut terciptanya perjuangan kelas. Situasi di mana buruh menginginkan kebutuhan-kebutuhannya tersalurkan dengan mendesak kaum pemilik modal. Dari upah yang memiliki nilai lebih ini, ia memulihkan tenaganya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Kelas-kelas sosial yang menentukan struktur dan perkembangan masyarakat. Bagi Mark, keadaan sosial manusia yang menempatkan kesadaran manusia. Semua sejarah digerakan oleh sebuah konflik antara kelas-kelas dan ketidakpunyaan alat-alat produksi. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa konflik menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat.

Fase Selanjutnya, Tokoh Georg simmel mengidektifikasi bahwa konflik sangat erat terjalin dengan pelbagai proses yang mempersatukan dalam kehidupan sosial, dan bukan hanya sekedar lawan dari persatuan.<sup>16</sup> Pandangan ini digunakan sebagai upaya untuk menjembatani pandangan Mark tentang konflik sosial dan pandangan Durkheim tentang integrasi dan solidaritas sosial. Mengandaikan konflik itu tidak biasa (abnormal) merupakan cara pandang yang bias dan tidak didukung kenyataan di masyarakat. Karena pada faktanya, Individu-individu tidak hanya ikut terlibat dalam konflik, tetapi mereka kelihatannya lebih bersemangat untuk

---

<sup>16</sup> Konflik bukan lawan dari persatuan karena lawan dari persatuan adalah ketidakterlibatan atau tidak ada satupun bentuk interaksi timbal-balik. Padahal konflik dan persatuan bisa dilihat dari sosial yang tidak lebih penting dan lebih bersifat mutlak dari yang lainnya, terlebih lagi keduanya merupakan interaksi yang bersifat timbal-balik. *Ibid...*, hlm. 269.



berkonflik. Hal yang biasanya terjadi di masyarakat, tidak adanya sesuatu yang penting dalam menciptakan konflik membuat isu-isu ringan dijadikan bumbu untuk konflik. Contoh yang dikemukakan oleh Simmel adalah pertikaian antara kedua partai di Irlandia yang membuat gaduh seluruh negeri, karena mempermasalahkan warna seekor sapi.

Konflik juga semakin memberikan batasan suatu kelompok itu dalam lingkarannya atau bukan. Ia semakin menegaskan jati diri di mana ia berada. Menurut pengamatan Simmer, konflik dengan orang yang berada dalam kelompok sendiri dalam banyak hal, sering meruncing dengan menghadirkan permusuhan dan lebih berbekas daripada konflik di luar kelompoknya. Penghianatan misalnya, bentuk ini mendapatkan hukuman yang setimpal dan jauh lebih berat ketimbang hukuman yang dijatuhkan kelompok lain. Hadirnya ancaman yang datang dari luar kelompoknya, konflik yang berasal dari dalam kelompoknya cenderung menurun atau rendah. Masalah-masalah internal yang dimunculkan sebelum kedatangan ancaman dari luar seolah-olah berhenti sejenak. Perhatian individu di dalam kelompok secara bersama-sama memusatkan perhatiannya pada musuh yang dihadapinya. Secara tidak langsung, solidaritas kelompok terbangun kuat.

Konflik tidak selamanya berkepanjangan, ada tahap akhir yang membuat konflik harus diakhiri. Bagi Simmer, motivasi-motivasi untuk menyudahi konflik bisa karena lelah atau bosan, atau karena keinginan untuk mencurahkan kepada kekuatan tenaganya pada hal-hal yang lain. Konflik menunjukkan kemenangan pada salah satu kelompok yang

berseteru, tetapi tidak menetup kemungkinan bahwa pihak yang kalah sama tidak harus kehilangan kekuasaan untuk terus berjuang. Pihak yang kalah bisa saja mengalah karena merasa sudah tahu hasilnya dan tidak ada yang perlu dilanjutkan konflik lagi. Kompromi tidak mungkin bisa diupayakan di saat apa yang diperebutkan itu tidak bisa dibagi. Namun, dalam kondisi tertentu kompromi bisa berwujud dalam pemberian hadiah bagi yang mengalami kekalahan akibat konflik.

Perdebatan konflik berlanjut setelah fungsional struktural tidak memadai dalam melihat struktur sosial masyarakat. Konflik digunakan sebagai jembatan dalam menampilkan struktur-struktur dan lembaga sosial. Betapapun begitu, konflik tidak pernah mampu memisahkan diri dari fungsional struktural. Tokoh yang mencoba membenturkan fungsional struktural dengan konflik sosial adalah Lewis A. Coser. Ia melihat bahwa kedua teori ini tidak bisa menjelaskan keseluruhan kenyataan sosial, karena nyatanya masyarakat itu sesekali berkonflik, tetapi dalam lain waktu mereka bisa saja membuat kesepakatan-kesepakatan. Gabungan kedua teori ini disebut dengan teori konflik fungsional. Coser mendasarkan analisisnya dalam *The Functional of Sosial Conflict* pada ide-ide Simel bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang dasar, dan bahwa proses konflik dihubungkan dengan bentuk-bentuk alternatif seperti kerjasama.<sup>17</sup> Lebih jauh, Coser berpendapat bahwa konflik dapat memberikan nilai positif di dalam kelompok atau masyarakat ketimbang hanya dapat merusak solidaritas. Coser ingin memperbaikinya dengan cara

---

<sup>17</sup> Khusniati Rofiah, "Dinamika Relasi Muhammdiyah dan NU dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser," *Jurnal Kalam*, Volume 10, No. 2, Desember 2016, hlm 476.

menekankan pada sisi positif yakni bagaimana konflik itu dapat memberi sumbangan pada ketahanan dan adaptasi dari kelompok, interaksi dan sistem sosial.<sup>18</sup>

Teori konflik menurut Coser ini diperkuat lagi dengan pendapat Dahrendorf. Kedua tokoh ini punya kegelisahan yang sama dalam mencari titik temu perdebatan fungsional struktural dan konflik sosial. Ia menyadari bahwa masyarakat tidak bisa dipisahkan dari konflik dan konsensus, karena keduanya syarat yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Dasar dari aliran fungsionalis memandang bahwa sistem sosial dapat diwujudkan dari kerjasama sukarela atau konsesus umumnya. Akan tetapi bagi teoritisi konflik (atau paksaan), masyarakat disatukan oleh ‘pembatasan yang dipaksakan’; dengan demikian, beberapa posisi di masyarakat merupakan otoritas yang di delegasikan kepada orang lain.<sup>19</sup> Sejatinya teori konflik fungsional yang dipopulerkan Lewis A. Coser ingin memberitahukan dibalik konflik, konsesus-konsesus masyarakat terjadi sehingga konflik mengandung nilai positif disaat konflik tersebut dilakukan secara terbuka.

## 2. Ruang Publik

Membicarakan ruang publik sekarang ini, tidak bisa terlepas dari sosok Jurgen Habermes. Bukunya yang berjudul *Structural Transformation of the Publik Spher; An Inquiry into a Category of Borgeois society* menjadi rujukan untuk memahami ruang publik dewasa

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 476

<sup>19</sup> Lihat George Ritzer, *Edisi Ke delapan Teori Sosiologi Klasik: Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 451

ini. Ruang publik tidak mudah kita pahami jika tidak melihat akar historisitasnya. Tata pikir setiap zamannya turut andil dalam merepresentasikan ruang publik. Harus dilacak jauh ke belakang untuk melihat bagaimana istilah ruang publik digunakan. Di dalam penafsiran diri Yunani Kuno, ruang publik menjadi sebuah alam kebebasan dan kekekalan.<sup>20</sup> Kebebasan terjadi karena ruang ini menyibak segalanya dan semuanya benar-benar terlihat. Siapa yang mampu tampil di ruang ini, kekekalan dan penghargaan akan didapatkan.

Warisan penafisiran Yunani kuno ini dimodifikasi di abad pertengahan. Melalui pola idiologis, membuat pemikiran ini bisa bertahan berabad-abad lamanya. Di periode ini, kategori-kategori seperti yang publik, yang privat dan ruang publik dipahami sebagai *res publica* yang diambil dari hukum Roma kuno. Istilah dari hukum roma yaitu *publicus* dan *privatus* telah digunakan di kalangan luas, tetapi maknanya tidak pernah memiliki kriteria yang baku.

Kategori-kategori ini mengalami pembentukan makna yang baru yang lebih sesuai dengan konteksnya. Kategori-kategori seperti yang disebutkan di atas, membentuk makna yang lebih teknis dan legal saat negara modern terbentuk dan ruang masyarakat sipil dipisahkan darinya. Tetapi jika dilihat secara Institusional, ruang publik dalam pengertian yang terpisah dan terbedakan dari ruang privat masih belum jelas terbukti di dalam masyarakat akhir abad pertengahan. Karena dalam sistem dominasi feodal di dasarkan kepada rakyat jelata dan ningrat. Pengorganisasian

---

<sup>20</sup> Jurgen Habermes, *Ruang Publik; Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, (Yogyakarta: Kasi Wacana, 2008), hlm. 5

ekonomi atas kerja sosial dipusatkan di dalam rumah tangga sang tuan atau ningrat.

Ketuanan atau ningrat direpresentasikan secara publik. Representasi dari ini bukan dibangun atas suatu bidang sosial, atau ruang publik, namun mirip dengan status tertentu. Sebenarnya posisi ningrat begitu netral dengan hubungannya dengan kriteria publik maupun privat, hanya saja posisinya adalah yang merepresentasikan dirinya secara publik. Kaum ningrat adalah apa yang diwakili/direpresentasikan, sementara kaum borjuis adalah apa yang dia produksi.”Jika kaum ningrat, meski hanya dengan pembawaan kepribadiannya, dapat menanggung segala sesuatu yang dimintakan kepadanya, maka kaum borjuis dengan pembawaan kepribadiannya, tidak pernah mewanarkan apa pun, bahkan tidak dapat menawarkan apapun.<sup>21</sup>

Setelah hilangnya sistem feodal atau penguasaan tanah oleh kaum ningrat, pereduksian publik bergeser di dalam perepresentasian/perwakilan, sehingga menciptakan ruang lain yang dikenal dengan ruang publik dalam pengertian modern ruang otoritas publik. Ruang ini yang dikenal Habermes dengan Ruang Publik Borjuis. Otoritas publik semakin menjadi nyata, otoritas feodal yang dipegang oleh ketuanan atau ningrat berganti menjadi pengawal dan manusia-manusia privat ada di bawahnya dan dialah yang membentuk publik.

---

<sup>21</sup> Ini bermula dari tangkapan Goethe dalam melihat perwakilan publik. Istilah ini secara modern berubah menjadi pribadi publik yang dalam perkembangannya bentuk ini dipahami sebagai otoritas publik atau pelayan negara. Kaum ningrat diadaptasi begitu punya perwujudan yang anggun. Ia dengan bebas mengaktualisasikan kepribadian dirinya karena memiliki hak untuk dilihat, tetapi tidak untuk kaum borjuis. Kaum borjuis tidak sanggup untuk mewakili, karena sudah di dekati oleh hakikatnya yang tidak mampu menciptakan dan hanya memaksa untuk dilihat. *Ibid...*, hlm. 20

Konsekuensinya muncul masyarakat sipil yang berdampak pada semakin terlihatnya ruang privat yang sama sekali berbeda dengan ruang publik.

Ruang publik inilah yang sangat lentur dan tidak kaku. Istilahnya ruang publik atau dalam bahasa Jerman-*Offentlichkeit* berarti keadaan dapat diakses semua orang (*Allgemeine Zuganglichkeit*) dan mengacu pada ciri terbuka dan inklusif.<sup>22</sup> Semua orang merayakan ruang ini dengan suka cita tanpa mempermasalahkan status sosial. Keseluruhan hubungan sosial didasarkan bukan karena status sosial, status ini terabaikan dan dikesampingkan. Mengacu pada konteks Eropa, Istana mulai kehilangan tarungnya dan sekarang ini kota menjadi poros baru. Istitusi-institusi baru muncul sebagai ruang publik yang lebih diminati. Dominasi kota semakin diperkuat oleh institusi-institusi baru, yang dengan semua ragamnya, di Inggris Raya dan perancis mengambil alih fungsi-fungsi sosial yang sama; kedai-kedai kopi di zaman keemasan Inggris antara tahun 1680 sampai 1730, dan salon-salon di periode transisi perwakilan dengan Revolusi Prancis.<sup>23</sup>

Ruang publik tidak bisa tunggal, ia berada dimana saja. Masyarakat sipil dapat bertemu dan mengobrol ringan dengan bahasa sehari-hari. Ini melibatkan antar orang dan menciptakan pola komunikasi. Ruang ini berupa kondisi-kondisi komunikasi, tidak terikat dengan institusi dan aturan apapun. Selama ada orang berinteraksi dengan bahasa sehari-hari,

---

<sup>22</sup> F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dan Teori Diskursus Jurgen Habermes*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm.135

<sup>23</sup> Didua negara ini yaitu Inggris dan perancis, institusi seperti ini digunakan sebagai diskusi-diskusi rutin dan pusat kritik. Awalnya institusi ini hanya bersifat kesustraan, namun kemudian bersifat politis juga, dengan begitu banyak bermunculan kelompok baru dari kalangan intelektual dan Aristokratis yang memiliki persamaan-permasalahan dalam titik tertentu. Lihat Jurgen Habermes, *Ruang Publik...*, hlm. 49

disitulah ruang publik ada. Ruang itu berada di dalam dunia-kehidupan (*Labensswlet*). Dunia-kehidupan terdiri dari kebudayaan, masyarakat dan kepribadian.<sup>24</sup> Semakin rasional dunia kehidupan, interaksi di dalamnya semakin mungkin untuk dikendalikan oleh pengertian bersama.

### 3. Identitas Nahdliyin Nasional

Narasi nahdliyin-Nasionalis memang belum akrab di telinga para akademisi. Untuk melihat suatu tipologi keagamaan masyarakat, biasanya kacamata Geertzlah yang dilirik tentang santri, abangan dan priyayi. Dalam perjalanannya tipologi ini menjadi perdebatan yang serius karena kesalahan pembagian yang dilakukan, dengan memasukkan priyayi sebagai bagian dari status keagamaan masyarakat. Padahal istilah ini dipakai untuk menandai status sosial, bukan termasuk pembagian status keagamaan. Secara tidak langsung golongan priyayi ini terhempas dalam melihat keagamaan masyarakat. Hingga akhirnya hanya ada santri dan abangan dalam menggambarkan status keagamaan seseorang di Jawa.

Santri dan abangan ternyata belum cukup digunakan oleh masyarakat Jawa secara total. Buktinya, penelitian yang dilakukan Institute for Javanese Islam Research di wilayah Tanggunggunung, Tulungagung tidak menemukan pemakaian terminologi santri dan abangan. Masyarakat yang tidak taat menjalankan kewajiban agama secara kompak tidak mau dilabeli sebagai abangan. Bukan berarti tidak meniadakan definisi status keagamaan yang dipakai Geertz, tetapi hanya ingin menegaskan, bahwa di

---

<sup>24</sup> Dunia kehidupan melibatkan pembeda yang nyata di dalam berbagai unsurnya. Kebudayaan akan menciptakan tindakan-tindakan, pola relasi sosial di masyarakat yang menyebabkan seseorang larut dalam keharusan berperilaku dan bagaimana seorang Individu/pribadi berpenampilan. Lihat George Ritzer, *Teori sosiologi; Dari klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 917

wilayah lokalitas tertentu yang lebih spesifik, klaim santri dan abangan tidak berlaku. Masyarakat memiliki identitas sendiri untuk mengutarakan dirinya.

Identitas yang melekat itu bernama Nahdliyin-Nasionalis<sup>25</sup>. Identitas ini yang dipakai masyarakat untuk meredam gejolak. Klain abangan dan santri ini seolah-olah membuat perpecahan di kalangan masyarakat, sehingga perlu diredam. Terminologi nahdliyin ini menunjukkan mayoritas masyarakat di wilayah yang diteliti berasal dari organisasi keagamaan yang biasa dikenal dengan Nahdlatul Ulama. Meluasnya orientasi keagamaan ini karena NU tidak mengusik tradisi leluhur yang telah lama diyakini. Ia mampu menjadi medium masyarakat karena bersikap akomodatif dengan budaya. Masyarakat Tanggunggunung menganggap hanya organisasi ini yang cocok untuk kultur masyarakat.

Selain identitas keagamaan yang melekat, banyak masyarakat bersifat terbuka dengan kegiatan yang dianggap menyimpang oleh ortodoksi Islam. Mereka sering menggunakan identitas nasionalis untuk menyebut sikap keterbukaannya dengan praktik-praktik yang dianggap menyimpang oleh ajaran Islam. Nasionalis dipahami berbeda oleh masyarakat Tanggunggunung. Setidaknya Istilah nasionalis ini tidak menggambarkan nasionalis yang kita kenal pada umumnya. Tetapi istilah menciptakan penguat untuk seluruh lapisan masyarakat dari sikap memihak golongan tertentu.

---

<sup>25</sup> Identitas ini untuk menyebut masyarakat Tanggunggunung yang memiliki identitas ganda (*double identity*). Ia disatu sisi menegaskan diri sebagai Nahdliyin, disisi lain ia dengan tegas menyebut dirinya nasionalis. Lihat laporan penelitian Institute for Javanese Islam Research, *Transformasi Relasi Santri-Abangan di Tanggunggunung*, 2017, hlm. 1



Nahdliyin dan nasionalis inilah yang membuat masyarakat Tanggunggunung memiliki identitas sendiri. Masyarakat meneguhkan diri dengan ke-Nu-an, di satu sisi masyarakat juga menganggap hal-hal yang dilarang dalam Islam merupakan hal yang sangat lazim dan dipraktekkan. Di titik inilah identitas ini menyatu di dalam masyarakat Tanggunggunung untuk menciptakan harmoni dan kerukunan. Ciri itu tercermin dari luwesnya masyarakat memahami satu sama lain, tanpa memberatkan unsur lainnya.

#### **F. Riset Terdahulu**

Ulasan mengenai masjid dan *langgar* sudah sejak lama diteliti oleh ilmuwan raksasa. Sebut saja para antropolog Indonesianis seperti Clifford Geertz, Andrew Beatty, dan Mark Woodward yang sangat serius meneliti Jawa. Penelitiannya memotret secara luas tentang Jawa dan selalu dirujuk atau yang paling mudah menyebutnya “Grand Narasi” Islam Jawa. Tetapi ringkasan tentang tempat ibadah ini mendapat tempat yang sangat sedikit. Mungkin karena masjid dan *langgar* menjadi salah satu bagian dari Islam Jawa dan sangat kecil pembahasannya. Maka, masjid dan *langgar* hanya dibahas seperlunya saja.

Clifford Geertz dalam bukunya *Agama Jawa; Abangan, Santri, Priyayi dalam kebudayaan Jawa* sedikit sekali menjelaskan tentang bangunan ini. Konsep ortodoksi Islam dimulai dari para kiai yang haji, menyambungkan pusat Islam di Mekkah hingga ketataran masyarakat Jawa. Ada pembagian kerja yang jelas dan tersistematis dalam menuguhkan Islam di Jawa. Pertama-

tama kepada para santri mereka, kemudian kepada penduduk lainnya lewat masjid dan *langgar* yang merupakan titik terminal riil dari jalinan komunikasi.<sup>26</sup> Tempat ini semacam medium masyarakat untuk bertatap muka dan menjalankan ibadah secara bersama-sama.

Ibadah ini dijalankan untuk memperlihatkan bangunan ini sebagai dasar Islam normatif. Andrew Beatty dalam bukunya *Variasi Agama di Jawa* menjelaskan bahwa *langgar* itu berhubungan dengan cara hidup bertetangga. Ia menjadi arena utama kehidupan sosial dan dimana nilai moral dibentuk, maka *langgar* punya andil yang cukup besar. Sebelumnya di daerah penelitian Beatty di daerah Bayu, banyuwangi belum berdiri masjid, yang ada hanya bangunan *langgar*. Tanpa adanya *langgar*, kesalehan akan menjadi patokan normatif; kewajiban skriptual tetap kewajiban, tetapi solidaritas santri dan umat akan memudar.<sup>27</sup> Jadi, rumah ibadah menjadi tempat memupuk solidaritas jamaah.

Jamaah yang dimaksud adalah orang yang sering pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat yang paling menjadi sorotan adalah sholat jum'at. Sholat ini menjadi interaksi tentang komunitas dan hierarti dari kalangan santri. Mark R. Woodward dalam bukunya *Islam Jawa; Kesalehan Normatif Versus Kebatinan* melihat bahwa ibadah sholat jum'at yang

---

<sup>26</sup> Pembagian kerja keagamaan terjadi di pedesaan Jawa, dimulai dari anak orang kaya yang pergi ke Mekkah untuk menemukan arti dan bentuk Islam yang sebenarnya, anak-anak yang beranjak dewasa pergi mencari ilmu di pondok pesantren dan mencari barokah kiai, orang-orang dewasa pergi ke masjid dan *Langgar* untuk mengaji al Qur'an dan menjalankan ritual sosialnya serta menyumbang semampunya untuk perkembangan Islam. Lihat Clifford Geertz, *Agama Jawa; Abangan, Santri, Priyayi dalam kebudayaan Jawa...*, hlm.260

<sup>27</sup> Bangunan masjid di Bayu ada di tahun 1953, tetapi *Langgar* sudah kokoh berdiri tanpa adanya masjid. *Langgar* jarang sekali kosong dan banyak aktivitas ditemukan di tempat tersebut. Intinya, *Langgar* menjadi tempat menyatukan berbagai kalangan dan ajang silaturahmi. Lihat Andrew Beatty, *Variasi Agama di Jawa; Suatu Pendekatan Antropologi*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 187

dilaksanakan di masjid menegaskan komunitas lokal. Masjid merupakan pusat komunitas dan berperan sebagai lokus kegiatan ibadah dan pengajaran keagamaan awal.<sup>28</sup> Terdapat konsekuensi moral yang diterima apabila tidak ikut terlibat sholat jum'at, tetapi ini tidak terjadi pada kewajiban sholat 5 waktu yang lebih rutin di masyarakat.

Penelitian Gedong Maulana Kabir dalam judul skripsinya *Sintesis Mistik Masyarakat Pesisir di Desa Panggungkalak, Pucanglaban* memberikan gambaran tentang situasi masjid dan langgar di daerah pesisir selatan. Lokasi tersebut berdekatan dengan Tanggunggunung. Ia mendeskripsikan bahwa aktivitas sholat jamaah di masjid Panggungkalak sepi peminat, bahkan saat sholat jum'at sekalipun. Hal tersebut tentu berbeda dari tradisi tahlilan. Ada anomali dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir selatan. Menurutnya, kondisi masjid yang cenderung sepi ini, bisa jadi juga dialami oleh masjid-masjid di tempat lain.<sup>29</sup>

Penelitian lebih lanjut yang secara spesifik meneliti tempat ibadah umat Muslim ini ialah Kholid Mawardi dalam tulisannya yang berjudul *Langgar; Institusi Kultural Muslim Pedesaan Jawa*. Ia melihat bahwa langgar mempunyai arti penting secara kultural bagi muslim pedesaan Jawa, sebagai setrum pelestarian dan peneguhan identitas mereka sebagai seorang Jawa

---

<sup>28</sup> Di Masjidlah anak-anak mulai diperkenalkan dengan ibadah tradisi santri mulai dari belajar membaca Al Qur'an, belajar sholat, serta pengetahuan tentang fiqh yang langsung dibimbing oleh tokoh agama. Lihat Mark R. Woodward, *Islam Jawa; Kesalehan Normatif Versus kebatinan*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2008), hlm. 213.

<sup>29</sup> Gedong Maulana Kabir, 129

sekaligus seorang muslim.<sup>30</sup> Ia berfungsi sebagai komunikasi religius antar jamaah dan tempat inisiasi bagi anak-anak laki-laki menuju usia muda.

Anak-anak usia muda menggunakan tempat ini untuk belajar membaca Al Qur'an. Dalam penelitian yang dilakukan Mohammad Kosim yang berjudul *Langgar sebagai Institusi Pendidikan Keagamaan Islam*, Ia melihat ada sejenis ancaman yang menggerogoti tempat yang digunakan pembelajaran al Qur'an ini. Munculnya TK al-Qur'an atau nama sejenisnya di tahun 1990-an yang lebih tersistematis turut menggeser peran tempat ibadah sebagai institusi pendidikan. Tentu menjadi tantangan berat bagi pengasuh *langgar* agar lembaga tradisional ini tetap eksis di tengah 'himpitan' modernisasi pendidikan Islam.<sup>31</sup>

Tantangan berat itu harus segera diatasi dengan berbagai hal. Dalam penelitian yang dilakukan M. Syamsudin yang berjudul *Daya Tahan Pendidikan Langgar Di Tengah Arus Modernisme Pendidikan Islam*, ia menyoroti *langgar* Baiturrahman perlu dikembangkan dan dipertahankan. Diantara aspek yang perlu dikembangkan adalah kemampuan pedagogik pengasuh agar proses pembelajaran dapat memberikan hasil optimal.<sup>32</sup> Selain itu, diharapkan pemerintah turut menyokong dalam pengembangan sarana belajar. Ternyata pendidikan yang berpusat di *langgar* terkesan jauh dari aturan-aturan formal sangat baik untuk pengembangan pembelajaran Islam.

---

<sup>30</sup>Sebagai institusi kultural, *Langgar* telah menyediakan berbagai rujukan nilai-nilai yang estetis bagi muslim Jawa dalam beragama dan bermasyarakat. Lihat Kholid Mawardi, "Langgar; Institusi kultural Muslim Pedesaan Jawa," *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol.12, No. 1, Januari-Juni 2014

<sup>31</sup> Mohammad Kosim, "Langgar sebagai Institusi...", hlm. 249

<sup>32</sup> M. Syamsudini, "Daya Tahan Pendidikan Langgar di Tengah Arus Modernisme Pendidikan Islam," *al-Adalah*, Volume 19 Nomor 2 November 2016.

Masjid memiliki peran strategis dalam perkembangan kebudayaan Islam. Salah satunya ia masih mempertahankan tradisi, seperti masjid Taqwa Wonokromo, kecamatan Pleret kabupaten Bantul. Masjid ini termasuk *masjid kagungan dalem* yang dimiliki raja dan tersebar diperbagai wilayah kesultanan Yogyakarta. Tradisi yang dipertahankan adalah *rebo pengkasan* yang diperingati setiap rabu bulan sapar di dalam penanggalan Islam. Kegiatan ini adalah ungkapan rasa syukur sekaligus mengenang pertemuan Sultan Hamengkubuwono I dengan Kyai Faqih Usman, tokoh penyebar Islam di daerah ini. Masjid ini memiliki fungsi lain seperti fungsi sosial, fungsi budaya, fungsi hukum, fungsi politik dan fungsi ekonomi.

Penelitian dari Syafuddin, menemukan fenomena yang unik. Masjid memiliki beragam fungsi dan dibanyak kasus menyebabkan perselisihan konflik yang keras. Syaifuddin memotret Masjid Al Muttqun di Prambanan Klaten Jawa Tengah yang berpotensi menimbulkan pertarungan antar organisasi. Ini sebenarnya adalah gambaran tentang beragam masjid di Indonesia. Konflik itu terjadi antara PKS dan Muhammadiyah. Ternyata masjid menjadi senyawa untuk meluncurkan kepentingan politik bagi kalangan Muslim. Ia melihat sebelum era reformasi, ritual Islam menjadi isu utama kontestasi diantara pendukung-Pendukung Islam, dimana setelah 1998 mereka memaikan peranan kunci. Masjid di Al Muttaqun digunakan sebagai sentral ritual keagamaan orang Islam, digunakan sebagai peranan signifikan didalam mendiseminasikan beberapa intepretasi Islam juga didalam memolisisasi politik. Karena itu prinsip netralitas dari masjid patut dipertanyakan kembali. Ia menjadi posisi sentral di dalam ruang keagamaan

umat muslim, juga memiliki posisi sosial politik di dalam Ruang Publik Indonesia.

Dari penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, perlu kiranya “Melihat Ulang Masjid dan *Langgar* Sebagai Ruang Publik di Kecamatan Tanggunggunung, Tulungagung”. Semua penelitian masih banyak memfokuskan diri pada tempat ibadah sebagai perantara komunikasi yang menciptakan solidaritas dan tempat pembelajaran keagamaan. Tetapi tidak semua menekankan demikian, seperti penelitian terdahulu yang dilakukan Syaifuddin. Ia melihat ada semacam gairah konflik kepentingan di dalam tempat ibadah. Penelitian terdahulu ini sangat penting karena menjadi acuan dalam melihat lebih jauh pandangan masyarakat Tanggunggunung mengenai masjid dan *Langgar* yang selama ini telah menjadi pemandangan yang tidak asing disudut-sudut desa di Tanggunggunung.

## G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini secara khusus memakai metodologi penelitian Kualitatif. Penelitian ini cocok dalam melihat bagaimana fenomena itu difahami dengan alamiah dalam ruang sosial tanpa menggunakan rumus tertentu. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 9

Dalam penelitian kualitatif ada berbagai model di dalam sejarah perkembangan dunia, tetapi peneliti menggunakan metode etnografi. Etnografi berasal dari kata *ethnies* dan *graph*. Kata-kata tersebut dapat diartikan sebagai suatu studi atau penelitian yang difokuskan pada penjelasan deskriptif dan interpretasi terhadap budaya dan sistem sosial suatu kelompok atau masyarakat tertentu melalui pengamatan dan penghayatan langsung terhadap kelompok atau masyarakat yang diteliti.<sup>34</sup> Dengan memakai model penelitian Etnografi, penelitian ini akan mampu mengamati masyarakat secara lebih proposional.

Penelitian ini melebur dengan masyarakat dalam melihat kebudayaan, nilai-nilai, pola kehidupan masyarakat. Seperti model lainnya di penelitian kualitatif, etnografi hadir dengan upaya menginterpretasikan makna yang disampaikan oleh informan. Dengan ini, Penelitian ini bersifat alamiah dan netralitas memperlihatkan cara pandang masyarakat yang diteliti. Menurut Cresswell, etnografi adalah desain kualitatif di mana seseorang peneliti menggambarkan dan meninterpretasikan pola, nilai, perilaku, kepercayaan dan bahasa yang dipelajari dan di anut oleh suatu kelompok budaya.<sup>35</sup> Penelitian ini memang terkonsentrasi pada kebudayaan manusia.

Mengingat penelitian ini terjun secara langsung ke dalam bagian untuk melihat sebuah peradaban, suku atau identitas lainnya. Titik klimaksnya sampai pada tahapan seseorang peneliti mampu menyatu dengan kehidupan asli masyarakat dan menjadi bagian dalam beberapa periode tertentu. Ciri-ciri yang dapat ditemui dalam penelitian etnografi ialah peneliti menuliskan

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 75

<sup>35</sup> Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Kelompok Intrans Publising, 2016), hlm.55

sesuai dengan apa yang dipikirkan masyarakat tanpa ada campur tangan peneliti. Singkatnya, peneliti ingin menjadikan pikiran informan apa adanya. Etnografi meletakkan masyarakat sebagai guru peneliti, bukan hanya mempelajarinya saja. Jadi etnografi tidak hanya mempelajari masyarakat tetapi lebih dari itu, etnografi belajar dari masyarakat.<sup>36</sup>

Maka, perlu melihat kebiasaan yang dilakukan masyarakat Tanggunggunung. Dalam konteks ini masyarakat Tanggunggunung menjadi area belajar seorang peneliti karena dari cara pandang informan, rentetan pengalaman akan dengan mudah didapat. Peneliti akan belajar dari masyarakat dalam memandang masjid sebagai tempat ibadah dan ruang publik. Tetapi, tanpa berbaur langsung dan menjadi bagian masyarakat Tanggunggunung, penelitian tidak akan berjarak dalam memandang fenomena pada wilayah yang ditelitinya.

## **H. Tahapan Penelitian**

### **1. Tahap Perencanaan**

- a. Menyusun Desain Penelitian (*Research Design*)
- b. Observasi pendahuluan
- c. Studi teoritis terkait tema penelitian yang diangkat
- d. Konsultasi

### **2. Tahap Pekerjaan Lapangan**

- a. Penggalan data
  - 1) Wawancara Mendalam

---

<sup>36</sup> James Spradley, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm.4



Bentuk wawancara mendalam memang berbeda dengan wawancara pada umumnya. Dalam prakteknya wawancara ini bukan wawancara biasa yang memakai pertanyaan yang ketat. Justru ini menggunakan jenis peristiwa percakapan (*Speech event*) yang khusus.<sup>37</sup> Keberhasilan dari wawancara ini terletak pada kemampuan seorang peneliti yang berbaur dengan subjek yang diteliti. Peneliti akan mendapatkan data yang melimpah ruah dengan pembicaraan yang bersahabat, ketimbang menggunakan pertanyaan-pertanyaan formal yang tersistem.

Kedua belah pihak dapat mempengaruhi proses wawancara. Artinya, obrolan yang ringan tetapi sesuai dengan jalurnya dan nyaman antar keduanya mempengaruhi proses wawancara dan data yang diperoleh. Serangkaian wawancara yang menyamakannya dengan obrolan persahabatan menemukan pembicaraan yang mengalir. Percakapan itu memungkinkan orang-orang yang diteliti tidak sadar kalau sedang diteliti karena pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan peneliti tergabung dalam pembicaraan yang santai.

## 2) Observasi Partisipan

Observasi memang bagian terpenting dalam penelitian. Karena di dalam penelitian, tidak mungkin seorang peneliti terjun tanpa mengamati lokasi dan cara hidup masyarakat yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menempatkan model observasi partisipan. Model ini digunakan seorang peneliti ketika dia berhasil masuk dan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.79

terlibat aktif di lokasi penelitian. Penelitian sosial mana pun pasti menggunakan model ini karena bagaimana mungkin peneliti meneliti tanpa menjadi bagian realitas itu sendiri. Untuk itu, partisipan bukanlah sebuah teknik penelitian tertentu, namun sebagai model penelitian dengan ciri keterlibatan sang peneliti dengan realitas itu sendiri.<sup>38</sup>

### 3) Dokumentasi

Data bisa diperoleh dari dokumen-dokumen entah itu pribadi atau publik. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>39</sup>. Dokumen pribadi ini berasal dari apa yang dimiliki subjek, bisa berupa diary, catatan hidup dan pengalaman yang disertai situasi sosial yang mengitari sekitarnya. Sedangkan dokumen publik biasanya bersifat publik dan dimiliki kalayak banyak, seperti jurnal-jurnal, buku ataupun peristiwa yang sudah di buang ke wilayah yang lebih luas.

#### b. Informan

Suatu penelitian pasti membutuhkan seorang yang berbicara untuk menggambarkan realitas yang terjadi di wilayahnya. Biasanya di dalam etnografi seseorang ini disebut informan. Penggunaan kata informan ini sesungguhnya berbeda dengan responden, pelaku dan

---

<sup>38</sup> Paul Atkinson dan Marthin Hammersley, *Etnografi dan Observasi Partisipan di dalam Handbook of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 317

<sup>39</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm.143

lainnya karena ini sifatnya ingin mencari yang asli. Maksudnya seorang informan itu pembicara asli yang mengalami langsung kejadian. Berbeda dengan responden yang biasanya pandangannya sudah tidak murni lagi. Seorang informan ditaruh dalam panggung singgasananya sebagai sumber informasi<sup>40</sup>. Untuk itu peneliti memilih informan yang bersinggungan secara langsung dengan tempat ibadah. Tetapi informan juga diambil dari masyarakat sesepuh yang tahu tentang kondisi desa dan sejarahnya.

c. Analisis Data

- 1) Membuat kodifikasi data
- 2) Menguji keabsahan data dengan triangulasi
- 3) Konfirmasi temuan lapangan dengan kajian teoritik, membandingkan, mengkombinasikan maupun mengabstraksi data
- 4) Menarik kesimpulan

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan hasil penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan. Selebihnya, merupakan lembar pendukung penyusunan mulai dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, table dan abstrak serta lampiran-lampiran pendukung penelitian.

---

<sup>40</sup> Sumber informasi di sini berarti seorang Informan adalah guru dari seorang peneliti yang memiliki wawasan yang luas. lihat James P. Spradley, *Metode Etnografi...*, hlm.39

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi tentang arahan penelitian mulai dari latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, riset terdahulu, metodologi penelitian, tahapan penelitian, sistematika pembahasan. Semua sub bab tersebut menggambarkan alur penelitian ini.

Pada bab dua atau menjamurnya masjid dan *langgar* pasca-65 di Tanggunggunung ini sudah masuk pada upaya untuk menjawab pertanyaan pertama penelitian. Di dalam bab ini terdapat tiga sub bab. *Pertama*, diskripsi Tanggunggunung. *Kedua*, penghulu dan modin: agen Islamisasi di Tanggunggunung setelah periode wali. *Ketiga*, *langgar* dan masjid: dari rumah ibadah menuju ruang keselamatan.

Pada bab tiga atau situasi tempat ibadah pra 1966 dan pasca 1965 di Tanggunggunung ini merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan kedua penelitian. Di dalamnya terdapat dua sub bab pembahasan. *Pertama*, Tempat ibadah Pra 65: tempat menjalankan kewajiban normatif. *Kedua*, Tempat ibadah pasca 65: Ruang Publik yang merekatkan masyarakat.

Pada bab empat atau luntarnya Fungsi masjid dan *langgar* sebagai Ruang Publik ini merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan ketiga penelitian. Di dalam bab ini terdapat dua sub bab pembahasan. *Pertama*, rumah ibadah tidak ramah lagi ‘Angker’ menyapa problem sosial. *Kedua*, Rumah ibadah kalah populer dengan *yasinan* dan *tahlilan*.

Pada bab lima atau penutup ini merupakan akhir pembahasan. Di dalamnya terdapat dua sub bab pembahasan. *Pertama*, kesimpulan. Kesimpulan menyajikan secara ringkas pokok-pokok seluruh penemuan

penelitian yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Kedua, saran yang berdasar pada hasil penelitian. Saran ini berisi langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk pihak terkait yang bersangkutan dengan hasil penelitian ini.